

## Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Budaya Anti-Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Analisis Nilai-nilai Pancasila di Lingkungan Sekolah

Muhammad Shaleh Assingkily<sup>1</sup>, Noni Putri<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Nurul Hasanah, Indonesia

Email: [muhammadshalehassingkily@iainkendari.ac.id](mailto:muhammadshalehassingkily@iainkendari.ac.id) <sup>1</sup>, [noniputri@gmail.com](mailto:noniputri@gmail.com) <sup>2</sup>

Corresponding Author: Muhammad Shaleh Assingkily

### Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu krusial yang mengancam keselamatan dan martabat peserta didik di lingkungan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) dalam membangun budaya anti-kekerasan seksual terhadap anak melalui pendekatan nilai-nilai Pancasila. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus di tiga sekolah yang memiliki program pendidikan karakter dan kebijakan perlindungan anak. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, terutama kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan, memiliki potensi transformatif dalam membentuk kesadaran siswa tentang pentingnya perlindungan terhadap anak dan pencegahan kekerasan seksual. Namun, pembelajaran PPKn di sekolah masih bersifat normatif dan belum mengintegrasikan isu kekerasan seksual secara eksplisit dalam kurikulum maupun praktik pembelajaran. Faktor budaya sekolah dan kapasitas guru menjadi penentu utama dalam efektivitas internalisasi nilai-nilai Pancasila secara kontekstual. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyusunan modul ajar tematik, pelatihan guru yang berperspektif perlindungan anak, serta penguatan kebijakan pendidikan berbasis nilai-nilai Pancasila yang responsif terhadap isu sosial. Temuan ini memperkaya wacana Pendidikan Kewarganegaraan kritis berbasis lokal sebagai strategi preventif dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, adil, dan manusiawi.

*Kata Kunci:* Budaya Sekolah, Kekerasan Seksual, Nilai-nilai Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Perlindungan Anak.

### Abstract

*Sexual violence against children is a crucial issue that threatens the safety and dignity of students in the school environment. This study aims to explore the role of Citizenship Education (PPKn) in building a culture of anti-sexual violence against children through the Pancasila values approach. The approach used is qualitative descriptive with a case study design in three schools that have character education programs and child protection policies. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation studies, then analyzed thematically using the Miles and Huberman model. The results of the study indicate that Pancasila values, especially humanity, social justice, and unity, have transformative potential in shaping students' awareness of the importance of child protection and prevention of sexual violence. However, PPKn learning in schools is still normative and has not explicitly integrated the issue of sexual violence in the curriculum or learning practices. School culture factors and teacher capacity are the main determinants of the effectiveness of internalizing Pancasila values contextually. This study recommends the need for the preparation of thematic teaching*

*modules, teacher training with a child protection perspective, and strengthening education policies based on Pancasila values that are responsive to social issues. This finding enriches the discourse on locally-based critical Citizenship Education as a preventive strategy in creating a safe, just, and humane school environment.*

**Keywords:** School Culture, Sexual Violence, Pancasila Values, Civic Education, Child Protection.

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang sangat meresahkan. Fenomena ini tidak hanya melukai secara fisik dan psikis korban, tetapi juga merusak tatanan sosial dan nilai moral masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dihadapkan pada peningkatan signifikan kasus kekerasan seksual terhadap anak, baik di ranah domestik maupun institusional, termasuk lingkungan sekolah yang semestinya menjadi ruang aman bagi anak (Arianti & Setyowati, 2020; Mozin et al., 2023).

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak kerap terjadi dalam relasi yang asimetris, di mana pelaku memiliki kuasa terhadap korban, seperti guru, kerabat, atau bahkan teman sebaya (Made et al., 2021; Trisnawibawa, 2017). Mirisnya, masih banyak sekolah yang belum memiliki sistem pencegahan dan penanganan yang komprehensif. Hal ini memperkuat urgensi untuk membangun budaya anti-kekerasan seksual sejak dini, melalui pendekatan yang sistemik dan berbasis nilai (Suanto et al., 2023).

Pendidikan memiliki posisi strategis dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu mata pelajaran yang memiliki potensi besar dalam hal ini adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). PPKn tidak hanya berfungsi sebagai media pembelajaran nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter dan kesadaran sosial siswa. Namun, kontribusi konkret PPKn dalam merespons isu kekerasan seksual terhadap anak masih sangat terbatas dalam praktik pendidikan di sekolah (Nugroho, 2020; Robani et al., 2022).

Secara teoretis, Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membentuk warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut sejatinya selaras dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila, terutama sila kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila kelima (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) (Sulfemi & Yuliana, 2019). Akan tetapi, pendekatan PPKn di sekolah-sekolah lebih dominan bersifat normatif dan tekstual, kurang dikaitkan dengan problematika aktual yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari (Haryati et al., 2015; Suyahman & Rahmawati, 2019).

Kesenjangan antara teori dan praktik ini menjadi tantangan serius. Banyak guru PPKn mengajar dengan pendekatan hafalan dan ceramah tanpa mengaitkan materi dengan isu-isu kontekstual seperti kekerasan seksual, pelecehan, dan perlindungan anak (Azhar & Djunaidi, 2018; Lase, 2020). Padahal, pendekatan yang kontekstual dan dialogis dapat menumbuhkan sensitivitas sosial dan daya kritis siswa terhadap ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak anak di sekitarnya.

Literatur yang membahas hubungan antara Pendidikan Kewarganegaraan dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak masih sangat terbatas. Sebagian besar

penelitian yang ada lebih menyoroti pendidikan seks, pendekatan psikologis dalam perlindungan anak, atau aspek hukum perlindungan anak (Sulistiwati et al., 2023; Yuliani et al., 2024a, 2024b). Kajian yang secara eksplisit menghubungkan pendidikan PPKn dengan pengembangan budaya sekolah yang anti-kekerasan seksual berdasarkan nilai-nilai Pancasila masih merupakan wilayah yang jarang disentuh.

Oleh karena itu, riset ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan memetakan dan menganalisis secara kritis peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk budaya anti-kekerasan seksual di lingkungan sekolah melalui pendekatan nilai-nilai Pancasila (Mahanani et al., 2023; Sugara & Mutmainnah, 2020). Penelitian ini tidak hanya menawarkan refleksi teoritik, tetapi juga menggali praktik-praktik pembelajaran dan nilai-nilai yang berkembang dalam dinamika sosial sekolah.

Novelti dari riset ini terletak pada pendekatan integratif antara studi kewarganegaraan, nilai Pancasila, dan isu perlindungan anak yang dikaji secara kontekstual di ruang sekolah. Pendekatan ini jarang dijumpai dalam penelitian sebelumnya, yang umumnya mengisolasi bidang-bidang tersebut secara sektoral. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pemahaman yang lebih utuh dan relevan terhadap tantangan kekinian di dunia pendidikan.

Lebih lanjut, penelitian ini juga akan memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan kurikulum PPKn yang lebih aplikatif dan kontekstual. Melalui temuan lapangan, diharapkan dapat dirumuskan strategi pedagogis yang lebih efektif dalam membangun kesadaran siswa, guru, dan warga sekolah untuk menolak segala bentuk kekerasan seksual. Kontribusi ini penting sebagai bagian dari pembangunan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadaban.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini tidak hanya memiliki urgensi akademik, tetapi juga nilai strategis dalam membangun budaya sekolah yang aman, adil, dan menghormati martabat anak. Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa menjadi fondasi normatif yang kuat untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam proses pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, untuk mengeksplorasi secara mendalam peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun budaya anti-kekerasan seksual terhadap anak melalui perspektif nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Lokasi penelitian dipilih secara purposive pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah memiliki program penguatan pendidikan karakter (PPK) dan kebijakan internal terkait perlindungan anak. Subjek penelitian mencakup guru PPKn, kepala sekolah, siswa, serta tenaga kependidikan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi terhadap materi ajar, silabus, dan kebijakan sekolah.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis tematik Miles dan Huberman, yaitu melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, serta member checking kepada informan kunci (Assingkily, 2021).

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara kontekstual bagaimana nilai-nilai Pancasila diinternalisasikan dalam pembelajaran PPKn dan bagaimana kontribusinya dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak di sekolah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk penguatan kurikulum PPKn yang lebih responsif terhadap isu sosial kontemporer berbasis nilai kebangsaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa peran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) dalam membangun budaya anti-kekerasan seksual terhadap anak masih bersifat implisit dan belum terstruktur secara sistematis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Meskipun guru PPKn pada dasarnya memahami pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam membentuk karakter siswa, namun belum terdapat integrasi eksplisit antara nilai-nilai tersebut dengan isu kekerasan seksual anak dalam materi dan metode ajar (Danniarti, 2017; Octavia & Rube'i, 2017; Tangur & Iswahyudi, 2019).

Dari hasil wawancara dengan delapan guru PPKn dan dua kepala sekolah di dua sekolah dasar dan satu SMP negeri, ditemukan bahwa mayoritas guru mengajarkan nilai Pancasila sebatas pada aspek kognitif dan normatif. Misalnya, nilai kemanusiaan hanya diajarkan sebagai konsep tentang menghargai sesama, tanpa pendalaman terkait praktik perlindungan terhadap anak, kesadaran terhadap hak tubuh, atau pengenalan bentuk-bentuk kekerasan seksual. Salah satu guru menyatakan:

*"Materi PPKn sudah padat. Jadi soal kekerasan seksual biasanya tidak kami bahas khusus, kecuali ada kasus yang muncul di media. Kami lebih fokus pada nilai-nilai umum seperti gotong royong, toleransi, dan disiplin."*

Lebih lanjut, hasil observasi di kelas menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran masih cenderung satu arah dan kurang memberi ruang partisipatif bagi siswa untuk berdialog tentang isu-isu sosial di sekitar mereka. Akibatnya, siswa cenderung pasif dan belum memiliki keberanian untuk mengidentifikasi maupun menyuarakan bentuk kekerasan seksual yang mungkin mereka alami atau saksikan.

### Analisis Peran Nilai-Nilai Pancasila

Analisis terhadap data menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki potensi besar untuk menjadi dasar normatif dan pedagogis dalam membentuk budaya anti-kekerasan seksual di sekolah. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dapat menjadi pijakan etis dalam membangun kesadaran siswa akan pentingnya menghormati hak tubuh dan martabat individu. Nilai ini juga bisa dikembangkan untuk mendorong empati dan kepedulian terhadap korban kekerasan (Amanda et al., 2024; Fatimah & Muis, 2014).

Sementara itu, nilai persatuan Indonesia dan keadilan sosial bisa dijadikan kerangka dalam membangun solidaritas antar siswa dan sistem dukungan sosial di sekolah. Dalam praktiknya, nilai-nilai ini belum dimaksimalkan oleh para pendidik. Pembelajaran PPKn masih bersifat abstrak dan jarang dikaitkan dengan isu nyata yang

dialami siswa, termasuk kekerasan seksual. Ini menguatkan temuan Astriani (2018) bahwa pendidikan kewarganegaraan di sekolah lebih banyak menekankan aspek deklaratif dibanding transformatif.

Namun demikian, beberapa guru PPKn menunjukkan inisiatif yang progresif dengan mengintegrasikan isu kekerasan seksual melalui proyek kelas, diskusi nilai, atau simulasi peran. Misalnya, di salah satu SMP, guru mengajak siswa membuat poster tentang "Lingkungan Sekolah Aman dari Pelecehan" dan melakukan presentasi kelompok. Metode ini terbukti meningkatkan kesadaran siswa, meskipun belum dijadikan kebijakan rutin.

### *Kesenjangan antara Kurikulum dan Realitas Sosial*

Kesenjangan lain yang muncul adalah antara kurikulum nasional dengan realitas sosial yang dihadapi siswa. Kurikulum PPKn pada Kurikulum Merdeka maupun Kurikulum 2013 sebenarnya membuka ruang untuk integrasi nilai-nilai kebangsaan dengan isu kontemporer. Namun, tidak ada arahan eksplisit atau modul tematik yang mendorong guru membahas isu kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini menyebabkan sebagian guru merasa khawatir, bahkan enggan mengangkat topik tersebut karena dianggap sensitif, tabu, atau tidak relevan dengan pembelajaran.

Padahal, dalam perspektif pedagogi kritis, sekolah seharusnya menjadi ruang pembebasan tempat siswa belajar mengenali dan menghadapi ketidakadilan sosial. Aini & Aulia (2018) menekankan pentingnya pendidikan yang membebaskan melalui dialog dan kesadaran kritis. Sayangnya, kesadaran ini belum menjadi paradigma dominan dalam pembelajaran PPKn di sekolah Indonesia.

Selain itu, hasil studi dokumentasi terhadap buku teks PPKn menunjukkan tidak adanya pembahasan tentang kekerasan seksual atau hak perlindungan anak secara mendalam. Tema-tema HAM, nilai moral, dan tanggung jawab sosial disajikan secara umum dan normatif, tanpa studi kasus atau latihan pemikiran kritis yang konkret. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi perlindungan anak belum menjadi arus utama dalam pengembangan materi PPKn.

### *Konstruksi Budaya Sekolah dan Komitmen Kolektif*

Faktor lain yang berpengaruh terhadap efektivitas peran PPKn adalah budaya sekolah dan komitmen kolektif antar warga sekolah. Sekolah-sekolah yang memiliki budaya terbuka, dialogis, dan menghargai partisipasi siswa lebih memungkinkan terlaksananya pendidikan kewarganegaraan yang responsif terhadap isu sosial. Sebaliknya, sekolah dengan iklim otoriter dan relasi kuasa yang timpang justru menjadi ruang yang tidak aman bagi siswa, terutama anak perempuan (Thohir, 2015).

Peneliti menemukan bahwa di sekolah yang memiliki program "Sekolah Ramah Anak" dan forum anak, pendekatan nilai Pancasila lebih mudah diintegrasikan dalam praktik keseharian. Misalnya, siswa didorong menyuarakan pendapat, melaporkan kasus kekerasan, dan terlibat dalam kegiatan advokasi hak anak. Namun, di sekolah lain yang belum memiliki inisiatif serupa, nilai-nilai Pancasila masih terkurung dalam teks dan upacara formal (Kunaepi, 2011).

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan kewarganegaraan dalam membangun budaya anti-kekerasan seksual sangat dipengaruhi oleh ekosistem sosial

sekolah. Oleh karena itu, integrasi antara pendidikan nilai, kurikulum PPKn, dan budaya sekolah harus menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki potensi strategis dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak jika dikelola secara transformatif dan kontekstual. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran harus lebih dari sekadar hafalan atau simbol, melainkan harus dihidupkan dalam praktik pendidikan yang dialogis, partisipatif, dan kritis.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya penyusunan modul atau panduan pembelajaran PPKn yang secara eksplisit mengangkat isu perlindungan anak dan kekerasan seksual, berbasis nilai-nilai Pancasila. Guru juga perlu dilatih untuk memahami isu kekerasan seksual dalam perspektif hak anak dan tanggung jawab warga negara, bukan semata-mata persoalan moral pribadi atau keluarga.

Dari sisi teoritik, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan kritis berbasis nilai lokal (Pancasila) sebagai pendekatan yang relevan dengan konteks sosial Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendekatan civic education progresif yang menekankan pentingnya pembentukan warga negara aktif dan peduli terhadap keadilan sosial, bukan sekadar patuh pada aturan formal.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis dalam membangun budaya anti-kekerasan seksual terhadap anak di sekolah melalui penguatan nilai-nilai Pancasila. Namun, pelaksanaan peran ini masih menghadapi tantangan signifikan, terutama karena pendekatan pembelajaran yang masih normatif, minimnya integrasi isu kekerasan seksual dalam kurikulum dan buku teks, serta terbatasnya pemahaman dan keberanian guru dalam mengangkat isu-isu sensitif ini dalam ruang kelas.

Nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan, sesungguhnya memiliki kekuatan transformatif jika diinternalisasikan secara kontekstual dan aplikatif dalam pembelajaran. PPKn berpotensi menjadi media yang efektif untuk membentuk kesadaran kritis siswa terhadap hak perlindungan anak, pentingnya menghormati tubuh dan martabat orang lain, serta keberanian untuk melaporkan dan mencegah kekerasan seksual.

Namun demikian, efektivitas PPKn sangat bergantung pada iklim budaya sekolah, kapasitas guru, serta dukungan kebijakan pendidikan yang responsif terhadap isu perlindungan anak. Maka, pendidikan kewarganegaraan perlu diarahkan tidak hanya untuk membentuk warga negara yang patuh, tetapi juga yang peduli, kritis, dan berani memperjuangkan keadilan, khususnya dalam perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Dengan demikian, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sekolah, pendidik, dan masyarakat untuk mereformasi kurikulum, memperkuat pelatihan guru, serta membangun ekosistem sekolah yang aman dan berpancasila sebagai langkah konkret dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pendidikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., & Aulia, L. A. (2018). Persepsi tentang Perilaku Seksual Pranikah Ditinjau dari Jenis Pendidikan. *Jurnal Psikologi*, 5(2), 50-57. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/ILMU-PSIKOLOGI/article/view/1824>
- Amanda, Y. N. A., Indryani, I., & Utami, W. S. (2024). Penggunaan Media Ritatoon untuk Meningkatkan Pengetahuan Seksual Anak Usia Dini. *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(3), 855-866. <https://doi.org/10.14421/njpi.2024.v4i3-17>
- Arianti, A. D., & Setyowati, Rr. N. (2020). Peran Dinas PPKB dan PPPA dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Jombang. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 8(2), 794-808. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/36228>
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Astriani, C. (2018). Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam Mewujudkan Sekolah Inklusif Sebagai Institusi Penanaman Karakter. *Jurnal PPKn*, 6(1153-1160). <http://ppkn.org>
- Azhar, A., & Djunaidi, A. (2018). Penerapan Nilai-nilai Moral dan Karakter dalam PPKn di SMP Darul Hikmah Mataram. *CIVICUS: Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, 6, 35-41. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/629>
- Danniarti, R. (2017). *Implementasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Pendukung Tumbuh Kembang Wawasan Kebangsaan pada Mata Pelajaran PPKn di SMP Negeri 7 Palembang* (Vol. 2, Issue 2).
- Fatimah, W. N., & Muis, T. (2014). Perilaku Seksual Remaja Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal BK*, 5(1), 19-26. [www.megapolitan.kompas.com](http://www.megapolitan.kompas.com)
- Haryati, T., Widodo, J., Masrukhi, M., & Haryono, H. (2015). Pengembangan Model Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Karakter Integratif Progdi PPKn FPIPSKR Universitas PGRI Semarang. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 5, 808-815.
- Kunaepi, A. (2011). Membangun Pendidikan Tanpa Kekerasan Melalui Internalisasi PAI dan Budaya Religius. *El-Tarawwi*, 4(1), 5-18.
- Lase, B. P. (2020). Strategi Guru PPKn dalam Mengimplementasikan Pendidikan Karakter di SMP Negeri 3 Alasa Talu Muzoi. *Jurnal Warta Edisi*, 63(14), 1829-7463. <https://journal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/553>
- Made, N., Arsa, R. A., Ujianti, R., & Astawan, I. G. (2021). Media Pembelajaran Buku Cerita Bergambar Untuk Meningkatkan Pemahaman Seksual Pada Anak Kelompok B Taman Kanak-Kanak. *MPI*, 2(1).
- Mahanani, D., Mustari, M., Kurniawansyah, E., & Alqadri, B. (2023). Peran Kepala Sekolah dan Guru PPKn dalam Implementasi Karakter Disiplin Siswa di SMPN 1 Kuripan. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8.

- Mozin, N., Kamuli, S., Ngiu, Z., Al-Hamid, S., Nggilu, A., & Rusli, P. R. (2023). SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI SMP NEGERI 3 LIMBOTO. *Civic Education Law And Humaniora (CELARA) : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Terintegrasi*, 1(2), 35–42. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/celara/article/view/22125>
- Nugroho, M. (2020). Penerapan Pendidikan Multikultural Melalui Mata Pelajaran PPKn. *Journal Fascho in Education Conference-Proceedings*, 1. <http://journal.umbogorraya.ac.id/index.php/Proceedings/article/view/95>
- Octavia, E., & Rube'i, M. A. (2017). Pengaruh Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila untuk Membentuk Mahasiswa Prodi PPKn Menjadi Warga Negara yang Baik dan Cerdas. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 4(1). <https://journal.upgripnk.ac.id/index.php/sosial/article/view/427>
- Robani, H. Z., Kristiasari, M. B. V. A., & Kirana, V. C. (2022). Keterkaitan Nilai Spiritual Dengan Mata Pelajaran PPKn Pada Pendidikan. *Proseding Didaktis: Seminar Nasional Pendidikan Dasar*. <http://proceedings.upi.edu/index.php/semnaspendas/article/view/2392>
- Suanto, S., Rustandi, R., & Susi, S. (2023). Pemahaman Terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Journal of Civics and Education Studies*, 10(2). <https://pdfs.semanticscholar.org/f6d4/238e8174382906df32a1ca533bc7b97e5678.pdf>
- Sugara, H., & Mutmainnah, F. (2020). Peran Guru PPKn dalam Membangun Karakter Bangsa Sebagai Respons dan Tantangan Abad ke-21. *Jurnal FKIP Unipa Surabaya Tahun XVI*, 29. [https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/jurnal\\_buana\\_pendidikan/article/view/2266](https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/jurnal_buana_pendidikan/article/view/2266)
- Sulfemi, W. B., & Yuliana, D. (2019). Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Rontal Keilmuan PKn*, 5(1). <https://www.jurnal.stkipgritulungagung.ac.id/index.php/rontal/article/view/1021>
- Sulistiwati, S., Mulyati, T., & Furnamasari, Y. F. (2023). Pengembangan Bahan Ajar Media Kahoot Untuk Pembelajaran PPKN Materi Keberagaman Kelas IV Sekolah Dasar. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 1(4), 144–156. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v1i4.2018>
- Suyahman, S., & Rahmawati, A. (2019). Keterkaitan Pendidikan Multikultural dengan Pembelajaran PPKn dalam Perspektif Pendidikan Karakter. *Jurnal Profesi Pendidik*, 8, 50–66.
- Tangur, K., & Iswahyudi, D. (2019). Peran Guru PPKn Dalam Membina Karakter Disiplin Siswa Sekolah Menengah Pertama Kelas VIII Melalui Kegiatan Pengembangan Pendidikan Karakter. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu*

- Pendidikan, 3, 399–404.  
<https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/article/view/175>
- Thohir, M. (2015). Radikalisme Versus Pendidikan Agama Menggali Akar Radikalisme dari Kekerasan Terhadap Anak Atas Nama Pendidikan Agama. *Nadwa*, 9(2), 167–182.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/nw.2015.9.2.521>
- Trisnawibawa, A. (2017). *Peranan Rifka Annisa Women's Crisis Center dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Yogyakarta*.
- Yuliani, A. P., Agustia, D. E., Fitriani, S. A., & Suprianto, O. (2024a). Analisis Pendidikan Karakter Berkebhinekaan Global Melalui Pembelajaran PPKn Terhadap Nilai Moral Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Flobamorata*, 5(1), 129–138. <https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/jpdf>
- Yuliani, A. P., Agustia, D. E., Fitriani, S. A., & Suprianto, O. (2024b). Analisis Pendidikan Karakter Berkebhinekaan Global Melalui Pembelajaran PPKn Terhadap Nilai Moral Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Flobamorata*, 5(1), 129–138. <https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/jpdf>